

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan

Secara legal, KEMITRAAN berdiri pada tahun 2001 bertepatan dengan masa transisi demokrasi. Namun inisiatif mengenai pembentukan KEMITRAAN sudah dituangkan pada rapat – rapat yang telah dilaksanakan pada akhir 2000 (Novita, 2021). Terdapat tokoh – tokoh besar yang ikut andil dalam pembentukan KEMITRAAN, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, Boediono, Marzuki Darusman yang pada masa itu menjabat sebagai Jaksa Agung, Erna Witoelar yang pada masa itu menjabat sebagai Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah, Nurcholish Madjid, Felia Salim, J.E. Sahetapy, Benyamin Mangoedilaga, Petrus Turang, Shanti Poesposoetjipto, Daniel Dhakidae, J.B. Kristiadi, Naimah Hasan, dan beberapa nama lainnya. Nama – nama tersebut merupakan pendiri sekaligus pihak yang menandatangani akta notaris KEMITRAAN (KEMITRAAN - Partnership for Governance Reform, 2021).

Secara resmi, KEMITRAAN lahir pada bulan Maret 2001 sebagai salah satu proyek dari *United Nations Development Programme* (UNDP). Kemudian pada tahun 2009, KEMITRAAN memutuskan untuk berdiri sebagai lembaga independen nasional dan tidak terikat lagi dengan UNDP. Sejak tahun 2009, KEMITRAAN menjadi organisasi non pemerintah nasional independen (Novita, 2021).

Dalam meningkatkan kapasitas yang dimiliki, KEMITRAAN tentu menyediakan pelatihan untuk karyawannya. Pelatihan tersebut biasanya disediakan sendiri oleh KEMITRAAN, atau bisa juga disediakan oleh para mitra yang bekerja sama dengan KEMITRAAN baik pelatihan berbayar maupun gratis. Pelatihan yang disediakan oleh KEMITRAAN sendiri diadakan berdasarkan kebutuhan setiap unit kerja (divisi). Kebutuhan unit biasanya dievaluasi di *Performance Evaluation* yang dilakukan setiap tahunnya sehingga unit *Human Resource* mendapatkan gambaran mengenai pelatihan apa yang akan dilakukan. Pelatihan yang diberikan oleh mitra contohnya adalah Kedutaan Belanda pernah memberikan pelatihan untuk 25 karyawan terpilih

KEMITRAAN. Pelatihan tersebut dilakukan selama tiga minggu di Belanda dengan segala biaya sudah ditanggung (Novita, 2021).

Karyawan yang bekerja di KEMITRAAN juga mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Fasilitas tersebut tidak dipotong dari gaji karyawan. KEMITRAAN memiliki biaya sendiri untuk fasilitas tersebut sehingga tidak mengganggu jumlah gaji yang didapatkan oleh karyawan. Kemudian karyawan juga mendapat asuransi sakit termasuk untuk *medical check up*. Asuransi tersebut tidak hanya diberikan untuk karyawan KEMITRAAN saja, tetapi keluarga karyawan seperti suami atau istri dan anak dengan premi Rp 200.000.000 per tahun. Selain itu, terdapat pula asuransi membuat kacamata (minus, plus, silinder), kesehatan gigi, dan vaksin (Rp 2.000.000 per tahun). Terdapat pula asuransi kematian jika karyawan KEMITRAAN meninggal dunia dan ahli waris mendapatkan sejumlah uang (Novita, 2021).

KEMITRAAN tentu saja telah melewati dari masa ke masa dari awal berdiri hingga saat ini. Perubahan tentunya menjadi salah satu bagian dari perjalanan yang dilalui KEMITRAAN. Berdasarkan wawancara dengan *Executive Secretary* KEMITRAAN, Hindijani Novita, perubahan tersebut dapat dilihat dari dua sisi, perubahan pada internal lembaga dan perubahan secara programatik yang dihasilkan oleh KEMITRAAN. Jika dilihat dari internal lembaga, KEMITRAAN awalnya hanya salah satu proyek UNDP dan hanya dibentuk untuk jangka waktu tertentu saja yaitu 2 sampai 3 tahun. Namun seiring berjalannya waktu, KEMITRAAN dirasa bisa bertahan hingga akhirnya melepaskan diri dari UNDP dan berdiri secara mandiri. Pada awalnya, seluruh bantuan dana untuk KEMITRAAN harus melalui UNDP tetapi sekarang KEMITRAAN dapat mengakses dana sendiri. Saat ini KEMITRAAN juga sudah memiliki beberapa akreditasi internasional yang tidak mudah dan tidak semua lembaga di Indonesia bisa mendapatkannya (Novita, 2021).

Dari segi program, KEMITRAAN awalnya berfokus pada isu – isu yang berkaitan dengan politik dan demokrasi. Hal tersebut terjadi karena KEMITRAAN didirikan pada masa transisi demokrasi. Salah satu contoh program awal KEMITRAAN adalah membangun serta mengawal terbentuknya KPK dan memperkuat KPU. Namun seiring berjalannya waktu, isu tersebut kalah eksistensinya dengan isu lingkungan sehingga saat ini KEMITRAAN pun turut terjun ke isu lingkungan tersebut (Novita, 2021).

KEMITRAAN mendapatkan dana dari donor. Donor merupakan pihak yang memberi sejumlah dana kepada KEMITRAAN untuk menjalankan sebuah program. Maka dari itu, untuk menarik donor untuk tetap memberikan dana tersebut, KEMITRAAN harus dapat mengetahui isu apa yang sedang ramai dan hangat di tengah masyarakat dan para donor (Novita, 2021).

Dalam jangka waktu 20 tahun semenjak berdiri, KEMITRAAN sudah mengantongi beberapa penghargaan serta lulus akreditasi di berbagai lembaga baik nasional maupun internasional. Dalam skala internasional, pada tahun 2009, KEMITRAAN juga lolos akreditasi *Checklist for Organizational Capacity Assesment (COCA)* yang dilakukan oleh Kedutaan Belanda untuk menerima sejumlah dana. KEMITRAAN menjadi organisasi pertama di Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana tersebut. Pada tahun 2016, KEMITRAAN menjadi yang pertama dan satu – satunya institusi nasional yang mendapat gelar National Implementing Entity (NIE) atau Entitas Pelaksana Nasional dari *Adaptation Fund*. Gelar tersebut merupakan tanda bahwa KEMITRAAN menjadi lembaga yang lulus akreditasi dan ditugaskan untuk melakukan tugas *Adaptation Fund* di Indonesia. Satu negara hanya memiliki satu lembaga yang memiliki gelar tersebut dan KEMITRAAN menjadi lembaga yang direkomendasikan oleh pemerintah. Pada tahun 2017, World Bank mengadakan akreditasi *Institutional Capacity Assasment* dan KEMITRAAN mendapatkan *rating* tertinggi. Pada tahun 2018, KEMITRAAN juga lulus akreditasi untuk mendapatkan dana dari UNOPS untuk program Desa Peduli Gambut. Pada tahun lalu, tepatnya tahun 2020, KEMITRAAN baru saja lulus akreditasi oleh *Green Climate Fund (GCF)* untuk menjadi salah satu mitra mereka yang terakreditasi (KEMITRAAN - Partnership for Governance Reform, 2021).

Dalam skala nasional, di tahun 2012, KEMITRAAN dianugerahi penghargaan *Management Award* oleh PPM Jakarta untuk inovasi, pencapaian, pengembangan model bisnis, serta tata kelola perusahaan yang baik. Pada tahun 2015, KEMITRAAN juga memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 dari PT SAI Global untuk Sistem Manajemen Mutu untuk pengembangan, manajemen, dan implementasi pelayanan yang berkaitan dengan tata kelola yang baik. Semenjak tahun 2004 hingga saat ini, KEMITRAAN selalu lolos kualifikasi audit yang dilakukan oleh tiga lembaga

independen setiap tahunnya. Kegiatan ini memang wajib dilakukan oleh organisasi, yaitu kegiatan audit tahunan yang dilakukan oleh tiga lembaga independen berbeda setiap melakukan audit dan berbeda pula setiap tahunnya (KEMITRAAN - Partnership for Governance Reform, 2021).

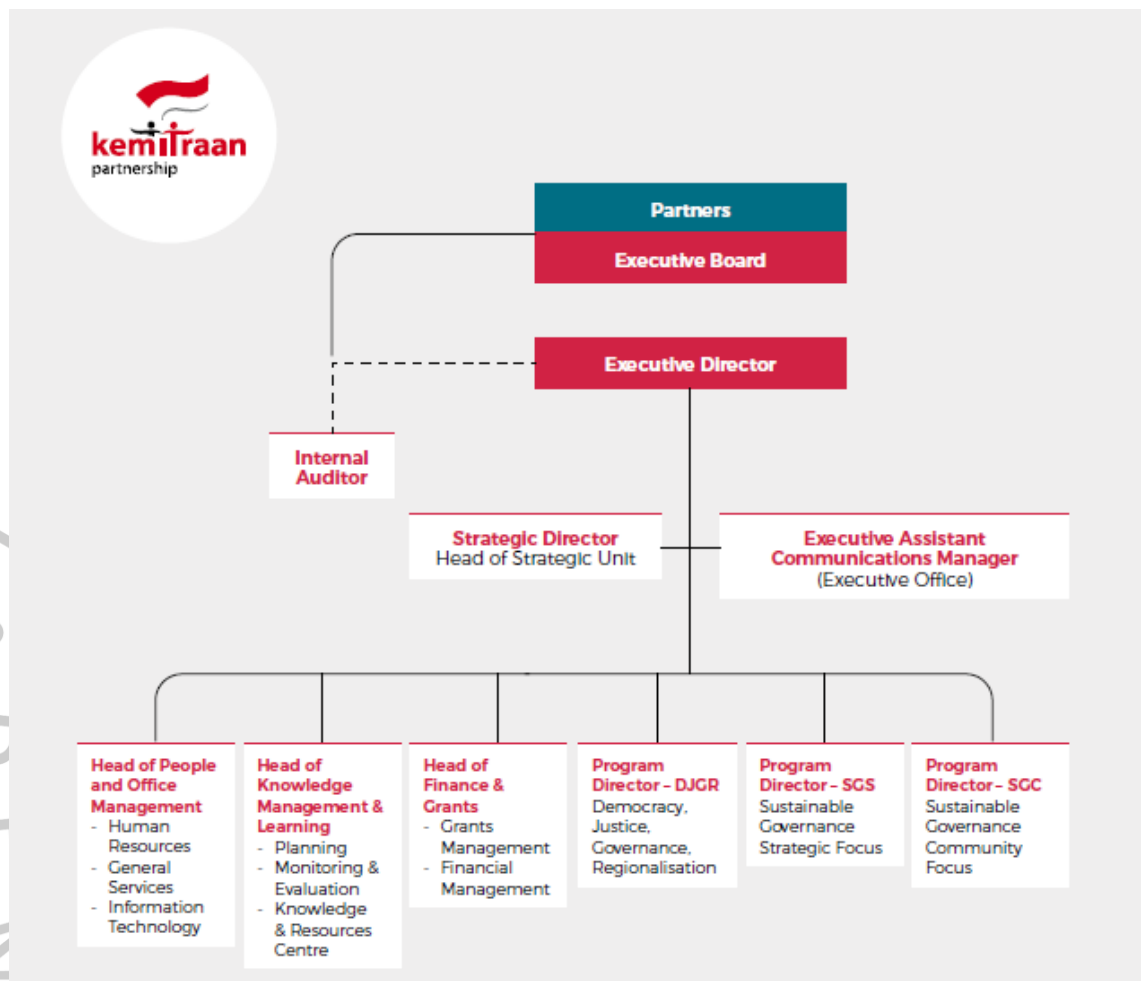
2.1.2 Visi

Mewujudkan pemerintahan yang adil, demokratis dan berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia (KEMITRAAN - Partnership for Governance Reform, 2021).

2.1.3 Misi

Menyebarkannya, memajukan, dan melembagakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih di kalangan pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha, dengan tetap mempertimbangkan hak asasi manusia, keseimbangan gender, kelompok yang terpinggirkan, dan kelestarian lingkungan (KEMITRAAN - Partnership for Governance Reform, 2021).

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi KEMITRAAN – Partnership for Governance Reform
Sumber: KEMITRAAN – Partnership for Governance Reform Annual Report 2020

Sebagai sebuah organisasi, KEMITRAAN tentu memiliki struktur di dalamnya. Berikut uraian struktur organisasi dan tugas setiap divisi yang ada di KEMITRAAN (Hutami, 2021);

a. *Partners* (Teman Serikat)

Partners merupakan pengatur utama di dalam organisasi ini. Pertemuan *Partners* secara keseluruhan menghasilkan arahan strategis jangka panjang dan berada dalam tingkatan yang tinggi. Dikutip dari *website* resmi milik KEMITRAAN, saat ini terdapat 10 *Partners*, di antaranya adalah Azyumardi Azra yang merupakan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Noke Kiroyan yang merupakan

founder dari Kiroyan Partners, Agustin Teras Narang yang merupakan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah periode 2005-2015, Endy M. Bayuni yang merupakan *Senior Journalist* di The Jakarta Post, Hikmahanto Juwana yang merupakan Profesor Hukum di Universitas Indonesia, Dr. Ida Fauziyah yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia periode 2019 hingga saat ini dan anggota parlemen periode 2014-2019, Nurul Arifin yang merupakan anggota parlemen periode 2019-2024, Kuntoro Mangkusubroto, Lukita Dinarsyah Tuwo yang merupakan Kepala Batam BP (Badan Pengusaha), dan Sylviana Murni yang merupakan Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Asian Para Games Indonesia 2018 (KEMITRAAN - Partnership for Governance Reform, 2021).

b. *Executive Board* (Dewan Eksekutif)

Dewan Eksekutif atau *Executive Board* yang bertugas untuk memantau implementasi atau kegiatan secara keseluruhan yang dilakukan oleh KEMITRAAN. Saat ini terdapat enam orang yang menjabat sebagai *Executive Board*, di antaranya adalah Agus Widjojo yang merupakan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANAS), Eva Kusuma Sundari yang merupakan anggota parlemen periode 2014-2019, Farouk Muhammad yang merupakan anggota dan Wakil Ketua DPD periode 2009-2019, Felia Salim yang merupakan Direksi Eximbank Indonesia, Petrus Turang yang merupakan Uskup Agung Keuskupan Agung Kupang di Nusa Tenggara Timur, dan Valina Singka Subekti yang merupakan Dosen Senior dan Ketua Departemen Ilmu Politik di Universitas Indonesia (KEMITRAAN - Partnership for Governance Reform, 2021).

c. *Executive Director* (Direktur Eksekutif)

Executive Director ditunjuk langsung oleh para *Executive Board*. *Executive Director* bertanggung jawab atas manajemen dan operasional sehari – hari. Saat ini yang menjabat sebagai *Executive Director* di KEMITRAAN adalah Laode Muhamad Syarif, PhD. yang merupakan komisaris KPK periode 2015-

2019 (KEMITRAAN - Partnership for Governance Reform, 2021).

d. *Executive Office* (Kantor Eksekutif)

Executive Office terdiri dari *Executive Assistant* (Asisten Eksekutif) dan *Communications Manager* (Manager Komunikasi).

e. *Strategic Director* (Direktur Strategis)

Strategic Director masih berada di level yang sama dengan *Executive Office*.

f. *People and Office Management*

Di dalamnya terdapat divisi *Human Resource* (HR), *General Service* (GS), dan *Information Technology* (IT).

g. *Knowledge Management & Learning*

Merupakan pusat pengetahuan dan pembelajaran. Di dalamnya terdapat divisi *Knowledge Research Center* (KRC) yang bertugas untuk melakukan riset dan *Project Monitoring & Evaluation* yang bertugas untuk mengawasi serta mengevaluasi proyek yang berjalan.

h. *Finance & Grants*

Bertugas untuk mengatur keuangan serta *grants* atau dana hibah yang didapatkan dari para donor.

i. *Democratic Justice Governance Regional* (DJGR)

Bertugas untuk menjalankan segala proyek yang berkaitan dengan tata kelola keadilan dan demokratis serta anti korupsi.

j. *Sustainable Governance Strategic* (SGS) yang bertugas untuk menjalankan proyek berkelanjutan dan tata kelola yang berkaitan dengan isu yang strategis.

k. *Sustainable Governance Community* (SGC)

Bertugas dalam menjalankan proyek berkelanjutan dan tata kelola yang berbasis komunitas.

2.2.1 Communications

Berbeda dengan organisasi lainnya, pada struktur organisasi KEMITRAAN tidak terdapat unit khusus untuk unit *Communcations*. Unit

Communications hanya terdiri dari satu orang yang sekaligus merupakan *Communications Manager*. Ia berada di dalam bagian yang sama dengan *Executive Assistant* atau bagian tersebut dapat disebut *Executive Office*. Saat ini memang unit *Communications* terdiri dari beberapa anggota namun diantara anggota tersebut ada yang merupakan bagian dari unit lain. Beberapa anggota lainnya juga merupakan staff kontrak yang hanya bekerja sesuai dengan proyek yang ada. Jadi tidak ada anggota di bawah *Communications Manager* yang benar – benar berdedikasi untuk unit *Communications*. Anggota yang ada di dalam unit *Communications* saat ini pun masing – masing terlibat di dalam satu proyek. Tugas dari unit *Communications* adalah membuat konten yang akan diunggah di website maupun media sosial KEMITRAAN. Substansi dari konten tersebut didapatkan dari anggota yang mengerjakan suatu proyek. Produk yang dihasilkan dari unit *Communications* saat ini dapat berupa konten artikel *website*, konten media sosial, *press release*, hingga kampanye yang berakitan dengan proyek yang sedang dikerjakan (Mulamawitri, 2021).

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

KEMITRAAN merupakan organisasi non pemerintah yang bekerja sama dengan berbagai mitra mulai dari kedutaan, perusahaan swasta, organisasi lainnya baik nasional maupun internasional, bahkan dengan pemerintah. Maka dari itu, dibutuhkan dana yang didapatkan dari donor (pemilik dana) untuk menjalankan program – program tersebut.

Produk utama dari KEMITRAAN adalah program. Program yang dihasilkan KEMITRAAN selama 20 tahun berdiri pun selalu berubah. Hal tersebut dapat dilihat dari rencana strategis KEMITRAAN yang dibuat setiap lima tahun. Program dibuat berdasarkan rencana strategis sudah yang dirumuskan secara bersama. Program yang direncanakan akan selalu berfokus pada tata kelola hanya saja isunya menyesuaikan apa yang sedang besar isunya (Novita, 2021).

Program tata kelola yang dibuat oleh KEMITRAAN juga tidak terbatas. Berbagai isu dan lembaga pernah bekerja sama dengan KEMITRAAN. Isu yang tak terbatas tersebut mencakup isu politik, demokratis, gender, lingkungan, dan lain sebagainya. Lembaga yang bekerja sama dengan KEMITRAAN pun tidak

terbatas dan mencakup lembaga pemerintahan, non pemerintahan, nasional, internasional, dan sebagainya (Novita, 2021).

Inti dari program KEMITRAAN adalah tata kelola. Bagaimana membuat atau melakukan tata kelola yang baik. Seperti yang sudah dijelaskan, isu yang ditangani oleh KEMITRAAN pun beragam. Lembaga yang menjadi mitra dari KEMITRAAN pun sama halnya. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan KEMITRAAN dalam menjalankan program tata kelola yang baik. KEMITRAAN biasanya melakukan riset terhadap program yang dilakukan. KEMITRAAN telah memiliki pengalaman dalam melakukan riset dengan pemerintahan nasional dan lokal serta mitra lainnya. KEMITRAAN telah berhasil memfasilitasi beberapa program politik dan demokrasi melalui riset (KEMITRAAN - Partnership for Governance Reform, 2021).

Selain riset, KEMITRAAN juga melakukan kesadaran publik dan advokasi. Lebih lanjut, KEMITRAAN juga melakukan penelitian dan advokasi kebijakan. Kegiatan itu telah menghasilkan beberapa program mulai dari program pemerintahan hingga program lingkungan. Kemudian, KEMITRAAN juga melakukan kegiatan sosial, tenurial (kepemilikan tanah) dan pemetaan adat. Dari kegiatan ini pun dihasilkan dua program (KEMITRAAN - Partnership for Governance Reform, 2021).

KEMITRAAN juga melakukan kegiatan penilaian (*assesment*) dan studi kualitatif. Seperti yang sudah dijelaskan pula, KEMITRAAN turut bekerja sama dengan lembaga pemerintahan. Dengan itu, KEMITRAAN juga memiliki kegiatan berupa bantuan teknis kepada kementerian dan pemerintah daerah. Lalu KEMITRAAN juga memiliki kegiatan peningkatan kapasitas dan pelatihan untuk *multi-stakeholders* (KEMITRAAN - Partnership for Governance Reform, 2021).